

**RANCANGAN
RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025**



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK
KABUPATEN BANGKA**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2025 ini disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pememrintah Daerah.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2025 ini memuat laporan evaluasi dan capaian evaluasi pelaksanaan rencana kerja Tahun 2023 terhadap Rencana Strategis Tahun 2024 – 2026 serta perumusan program dan kegiatan serta anggarannya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2025, saran-saran inovatif dan konstruktif akan sangat membantu demi kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja OPD dimasa yang akan datang.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmad-Nya kepada kita semua, amin.

Sungailiat, Januari 2024
Kepala Dinas,

Drs. Teddy Sudarsono, M.Si
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19660819 199603 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang.....	1
Landasan Hukum	2
Maksud dan Tujuan	4
Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU	
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD.....	8
Analisis Kinerja Pelayanan OPD	12
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	20
Review Terhadap Rencana Awal RKPD	23
Penelaah Usulan Prpgram dan kegiatan Masyarakat.....	29
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	30
Tujuan dan Sasaran Renja PD	32
Program dan Kegiatan	33
BAB IV RENCANA KERJA dan PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
Rencana Kerja.....	35
Pendanaan	40
BAB V PENUTUP	41

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan perencanaan perangkat daerah dilaksanakan secara bertahap dan simultan. Setelah penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja yang dimulai pada minggu kedua tahun sebelumnya, tahapan penyusunan perencanaan perangkat daerah memasuki tahapan penyusunan Rancangan Rencana Kerja dan terakhir penyusunan Rancangan Akhir dan penetapan Rencana Kerja.

Penyusunan Renja Dinkominfotik Kabupaten Bangka Tahun 2025 dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan periode Renstra Dinkominfotik Tahun 2024-2026, maka penyusunan Rancangan Renja Dinkominfotik Tahun 2025 dilaksanakan secara simultan dengan penyusunan Renstra Dinkominfotik Tahun 2024-2026. Hal ini sesuai dengan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru yang menyebutkan bahwa Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2023 diperintahkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024-2026 serta memerintahkan seluruh kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra PD Tahun 2024-2026. Penetapan Renstra tersebut paling lambat dilaksanakan pada minggu ke empat bulan Maret Tahun 2023. Selanjutnya Renstra Tahun 2024-2026 akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menetapkan Rencana Kerja Tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

Selain hal tersebut di atas, penyusunan Renja Dinkominfotik Tahun 2025 juga berpedoman kepada hasil evaluasi Renja Dinkominfotik tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan untuk memastikan rumusan program dan kegiatan yang disusun dalam Renja Dinkominfotik Tahun 2025 telah selaras dengan rencana pencapaian sasaran Renstra Dinkominfotik yang secara bersama-sama dengan penyusunan Renja dirumuskan. Renja Dinkominfotik tahun 2024 juga mengacu kepada RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2024.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Hal ini tertuang dalam Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Dinkominfo) Kabupaten Bangka menyusun Renja Dinkominfo Kabupaten Bangka Tahun 2025 yang mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan sebelumnya dalam Renstra Perangkat Daerah;
- b. Renja Perangkat Daerah disusun sebagai dokumen penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun berkenaan;
- c. Renja merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan;
- d. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrument pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah sendiri terdiri dari beberapa tahapan utama yaitu:

- a. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
- b. Penyusunan Renja Perangkat Daerah
- c. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang difasilitasi oleh Bappeda
- d. Perumusan Renja Perangkat Daerah
- e. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Setelah melalui beberapa tahapan dalam penyusunannya, Renja perangkat daerah disempurnakan dan menjadi Renja Perangkat Daerah yang definitif dengan kriteria sebagai berikut:

1. Merupakan dokumen penjabaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025;
2. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2025;
3. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2025;
4. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;

5. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indicator kinerja hasil (outcome), indicator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju Tahun 2026.

Renja Perangkat Daerah Dinkominfo Kabupaten Bangka disusun sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2025 yaitu "***Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Berwawasan Lingkungan dan Berkesinambungan***".

Adapun makna dari tema tersebut adalah menyusun prioritas dan sasaran pembangunan daerah untuk lebih difokuskan memacu peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mengembalikan kemandirian sosial masyarakat yang terpuruk akibat pandemi Covid-19 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu kebijakan lintas sektoral yang mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu kebijakan yang berfokus pada pemulihan industri (baik kecil, menengah dan besar), pariwisata dan kemudahan investasi berbasis teknologi informasi.

Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Diskominfo Kabupaten Bangka dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
10. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
29. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan Daerah
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemetintah Daerah
32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
33. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005- 2025;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
38. Peraturan Bupati Bangka Nomor 57 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe A Kabupaten Bangka;
39. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);
40. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24).

Maksud dan Tujuan

Maksud dari dibuatnya Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2025 adalah untuk menentukan arah pelaksanaan pembangunan serta sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2025, yaitu :

1. Tersedianya penjabaran Rencana Strategis Dinkominfotik ke dalam Rencana Operasional Tahun 2025,
2. Terpeliharanya konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Dinkominfotik;
3. Terlaksananya pengukuran kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan.

Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Landasan Hukum

Maksud dan Tujuan

Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2019-2023

Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Review Terhadap RKPD

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**BAB V. PENUTUP**

BAB II

HASIL EVALUASIRENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Seperti yang tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah berkewajiban mengevaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu atau sebelumnya, hal ini bertujuan tidak lain untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan didalam Renja Perangkat Daerah terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Adapun tiap urusan dijabarkan kembali dengan program dan kegiatan yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinkominfotik Kabupaten Bangka adalah penjabaran tahunan dan memanfaatkan data kinerja Rencana Strategis pada 5 (lima) tahun sebelumnya. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinkominfotik ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan, program dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh dinkominfotik selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2024. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan penetapan indikator kinerja, yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan Indikator kinerja. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan menggunakan indikator kinerja kegiatan.

Pada tahun 2023 Anggaran Belanja Langsung Dinkominfotik Kabupaten Bangka sebesar Rp.9.847.657.958,00 untuk pelaksanaan 3 (tiga) urusan pemerintahan, 5 (lima) program dan 10 (sepuluh)

Kegiatan. Dari jumlah dana tersebut teralisasi keuangan sebesar Rp. 9.094.635.413,00 dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 92,35%.

Sementara itu, untuk pelaksanaan Tahun anggaran 2025 dengan total anggaran sebesar **Rp. 10.579.319.700,00** untuk pelaksanaan 3 (tiga) urusan pemerintahan, 5 (lima) program dan 12 (dua belas) Kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100%, baik realisasi keuangan maupun capaian fisiknya.

Selanjutnya berdasarkan pengukuran kinerja atas indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Dinkominfotik Tahun 2019-2023 dan diperjanjian secara tahunan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, capaian IKU Dinkominfotik Kabupaten Bangka Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinkominfotik
Kabupaten Bangka Tahun 2023

No	Indikator	Capaian 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2023 terhadap Target Renstra (%)
			Target	Realisasi	%		
1.	Persentase layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi yg terintegrasi	193,10	58,82	100,00	170,01	100,00	170,01
2.	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	103,18	BB (73,25)	BB (.....)	100,00

Secara umum capaian kinerja Dinkominfotik Kabupaten Bangka sampai dengan tahun 2023 telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Dinkominfotik Tahun 2019-2023 bahkan telah melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra. Capaian kinerja atas indikator persentase layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi yg terintegrasi yang sesuai dengan RPJMD telah melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra. Akan tetapi capaian ini tidak bersifat permanen. Apabila Dinkominfotik tidak berhati-hati dalam mengendalikan pencapaian kinerjanya maka dapat dipastikan capaian kinerja atas semua indikator tersebut dapat menurun atau tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk indikator *Persentase layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi yg terintegrasi* dapat ditampilkan pada tabel berikut ini :

Persentase layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis teknologi informasidan komunikasi yg terintegrasi

No	Jenis Layanan Publik	Perangkat Daerah Penanggung jawab		Produk Layanan	Akses Aplikasi	Ket
1	Kesehatan	Dinas Kesehatan	1	Layanan Penanganan Kegawat daruratan (PSC119)	spgdt.bangka.go.id	√
			2	Layanan Informasi Donor Darah (SIDORA)	sidora.bangka.go.id	√
			3	Layanan Kesehatan Ibu Hamil Berisiko Tinggi (RESTICIKAR)	siresticikar.bangka.go.id	√
		RSUD DEPATI BAHRIN	4	Website Dinas Kesehatan	Dinkes.bangka.go.id	√
			5	LADA PUTIH	Download Link	√
			6	Emergency Rescue Brigade	Download link	√
2	PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	7	Info Mutasi untuk SMP (SILAMUS)	silarnus.bangka.go.id	√
			8	Website Dinas Pendidikan	Dindikpora.bangka.go.id	√
3	PENGADAAN BARANG DAN JASA	SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA)	9	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Online	lpse.bangka.go.id	√
4	PENGELOLAAN PENGADUAN	INSPEKTORAT	10	Layanan penerimaan pengaduan pelayanan Publik	lapor.go.id	√
			11	Website Inspektorat	Inspektorat.bangka.go.id	√
5	PERIZINAN DAN INVESTASI	DINAS PMP2KUKM	12	Layanan Perizinan Berusaha	oss.go.id	√
			13	Terintegrasi	sicantikui.layanan.go.id	√
			14	Website Dinpmp2kukm	Dinpmp2kukm.bangka.go.id	√
6	INFORMASI HUKUM	SEKRETARIAT DA (BAG HUKUM DAN HAM)	15	JDIH	jdih.bangka.go.id	√
7	PERHUBUNGAN	DINAS PUPR DAN PERHUBUNGAN	16	Info Pelayanan Uji Kendaraan Bermotor	silajuramor.bangka.go.id	√
			17	Website Dinas Perhubungan	Dinhub.bangka.go.id	√
8	KEPEGAWAIAN	BKPSDMD	18	Sistem Informasi Kepegawaian	simpur.bangka.go.id	√
			19	Aplikasi E-Kinerja	e-kinerja.bangka.go.id	√
			20	Website BKPSDMD	Bkpsdmd.bangka.go.id	√
9	PARIWISATA	DINAS PARIWISATA DAN PORA	21	Sistem Informasi data Kepariwisataaan	pariwisata.bangka.go.id	√
			22	Website Dinas Pariwisata	Dinparbudaya.bangkago.id	√

			23	Duathlon	sungailiatduathlon.com	√
			24	Trail Run	bangkaexotictrailrun.com	√
10	PERTANIAN /PETERNAKAN	DINAS PERTANIAN	25	Puskesmas online	puskesmas.bangka.go.id	√
			26	Website Dinas Pertanian dan Pangan	Dinpertan.bangka.go.id	√
11	KEARSIPAN	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	27	Pengelolaan arsip secara digital	sikn.bangka.go.id	√
			28	Website Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Arpusda.bangka.go.id	√
	PERPUSTAKAAN		29	Pengelolaan data perpustakaan secara digital	inilite.perpusnas.go.id	√
12	LAYANAN INFORMASI PEMERINTAHAN	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	30	Informasi penyelenggaraan pemerintahan	ppid.bangka.go.id	√
			31	Website Pemkab Bangka	Bangka.go.id	√
			32	SP4N LAPOR		√
	KEPEGAWAIAN		33	Aplikasi Finger Print	Sidikjari.bangka.go.id	√
13	KEPENDUDUKAN	DINAS DUKCAPIL	34	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan online	SIAM online	√
			35	Website Dinas Dukcapil	Dukcapil.bangka.go.id	√
14	PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN	BPKAD	36	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	simkeu-bangka.simdacloud.id	√
		BP2RD	37	Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan	pbb.bangka.go.id	√
			38	Website BPPKAD	Bppkad.bangka.go.id	√
15		BAPPEDA	39	Website BAPPEDA	Bappeda.bangka.go.id	√
16		BPBD	40	Website BPBD	Bpbd.bangka.go.id	√
17		KESBANGPOL	41	Website KESBANGPOL	Bankesbangpol.bangka.go.id	√
18		DINAS SOSIAL	42	Website DINSOS	Dinsos.bangka.go.id	√
19		DINAS KB	43	Website DP2KBP3A	Dp2kbp3a.bangka.go.id	√
20		SATPOL PP	44	Website SATPOL PP	Satpolpp.bangka.go.id	√
21		DINAKERPERINDAG	45	Website DINAKERPERINDAG	Dinakerperindag.bangka.go.id	√
22		DINPERKPP	46	Website DINPERKPP	Dinperkpp.bangka.go.id	√
23		DPUPR	47	Website DPUPR	Dpupr.bangka.go.id	√
24		DLH	48	Website Dinas LH	Dlh.bangka.go.id	√
25		DINPERKAN	49	Website Dinas Perikanan	Dinperkan.bangka.go.id	√
26		Kec. Sungailiat	50	Website Kec. Sungailiat	Kecsungailiat.bangka.go.id	√
27		Kec. Pemali	51	Website Kec. Pemali	Kecpemali.bangka.go.id	√
28		Kec. Merawang	52	Website Kec. Merawang	Kecmerawang.bangka.go.id	√
29		Kec. Mendo Barat	53	Website Kec. Mendo Barat	Kecmendobarat.bangka.go.id	√
30		Kec. Bakam	54	Website Kec. Bakam	Kecbakam.bangka.go.id	√
31		Kec. Puding Besar	55	Website Kec. Puding Besar	Kecpudingbesar.bangka.go.id	√
32		Kec. Riau Silip	56	Website Kec Riau Silip	Kecriuasilip.bangka.go.id	√
33		Kec. Belinyu	57	Website Kec. Belinyu	Kecbelinyu.bangka.go.id	√
34		Sekretariat DPRD	58	Website DPRD Bangka	Dprd.bangka.go.id	√

Pencapaian kinerja sasaran Tahun 2023 merupakan gambaran Kinerja Tahun Kelima untuk Sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023. Rumusan Tujuan Sasaran Indikator serta target kinerja yang dilaporkan merupakan hasil penyelarasan dan review RPD Kabupaten Bangka yang sekaligus merupakan hasil Perubahan Renstra Dinkominfotik Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023.

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab.Bangka pada tahun 2023 tidak mengalami hambatan yang berarti, terlihat pada pencapaian atas realisasi kinerja dan target rencana yang terpenuhi, bahkan realisasi kinerja melampaui target. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat di form berikut :

Tabel T.C.29
Rekaputilasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s.d. Tahun 2023
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab.Bangka

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.16	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI (%)	0	0	0	0	0	0	0	0
		Indeks Profesionalisme Aparatur	100	100	100	100	100	100	100	100
		Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur	100	100	100	100	100	100	100	100
		Indeks tata laksana organisasi perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
2.16.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
2.16.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	21	7	7	7	100	7	21	100
2.16.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang disusun	36	12	12	12	100	12	36	100
2.16.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100
2.16.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tertangani (bulan)	36	12	12	12	100	12	36	100
		Jumlah Laporan Keuangan yang disusun(laporan)	114	38	38	38	100	38	114	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.16.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang penilaian kinerjanya baik (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
2.16.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian olah raga yang tersedia (stel)	48	16	16	16	100	16	48	100
2.16.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
2.16.01.2.06.09	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah layanan rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah yang Tertangani (bulan)	36	12	12	12	100	12	36	100
2.16.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang Dikelola sesuai peraturan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
2.16.01.2.08.01	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan jasa persuratan yang tertangani (bulan)	36	12	12	12	100	12	36	100
2.16.01.2.08.02	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang tertangani (bulan)	36	12	12	12	100	12	36	100
2.16.01.2.08.04	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan jasa Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor yang tertangani (bulan)	36	12	12	12	100	12	36	100
2.16.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
2.16.01.2.09.02	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah layanan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional yang tertangani (unit)	33	11	11	11	100	11	33	100
2.16.01.2.09.06	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara (paket)	3	1	1	1	100	1	3	100
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terintegrasi (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
2.16.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab	Persentase regulasi yang diimplementasikan OPD di bidang Kominfotik (%)	98	67,14	67,14	67,14	100	67,14	98	100
2.16.02.2.01.06	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah informasi publik yang disampaikan kepada	100	500	500	303	60,6	2015	100	100
2.16.02.2.01.10	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah SARPRAS yang Tersedia (paket)	3	1	1	1	100	1	3	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah SDM Komunikasi Publik yang Bersertifikat	9	3	3	2	66,67	56	9	100
2.16.02.2.01.12	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Kerjasama Media	100	30	213,33	94	44,1	94	100	100
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terintegrasi (%)	58,82	44,12	50	96,55	193	239	58,82	100
2.16.03.2.02	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Regulasi yang Diterbitkan di Bidang Tata Kelola TIK (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
2.16.03.2.02.01	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks SPBE (nilai)	3,1	2,7	3	1,85	61,67	146,77	3,1	100
2.16.03.2.02.01	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi yang dikembangkan (aplikasi)	15	5	5	6	120	73	15	100
2.20.02	PROGRAM PPELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terintegrasi (%)	58,82	44,12	50,00	96,55	193	100	100	100
2.20.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia	100	100	100	100	100	100	100	100
2.20.02.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Data Statistik Sektoral	15	5	5	5	100	100	100	100
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terintegrasi (%)	58,82	44,12	50,00	96,55	96,55	100	100	100
2.21.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab	Indeks KAMI (Kematangan)	2	1	1	0	1	0	1	100
2.21.02.2.01.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Aplikasi yang sudah dilakukan IT Security Assesment (aplikasi)	12	4	4	0	0	33	12	100

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana kerja Dinkominfotik Kabupaten Bangka Tahun 2023 sebagaimana tersaji pada tabel diatas, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

a. *Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran:*

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinkominfotik Kabupaten Bangka Tahun 2023, program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran, yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan kegiatan :
 - Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan output **Indeks KAMI**, realisasinya tidak ada.
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik, dengan output **Jumlah Aplikasi yang sudah dilakukan ITSA**, realisasinya tidak ada.

b. *Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran:*

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinkominfotik Kabupaten Bangka Tahun 2023, program/kegiatan memenuhi target kinerja hasil/keluaran, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan:
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan kegiatan :
- Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
 - Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan kegiatan:
- Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial dengan kegiatan:
- Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektorial di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektorial
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan kegiatan :
- Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

c. Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran:

Tidak terdapat program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran.

d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan:

Ada beberapa faktor penyebab tidak tercapai, terpenuhi atau melebihi target kinerja :

1. Perencanaan kegiatan yang kurang akurat
2. Terlaksananya koordinasi antar sektor terkait

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra PD

Berdasarkan target capaian program sesuai dengan Renstra 2019 – 2023, secara umum seluruh program / kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut:

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Capaian s/d 2023
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100,00%	100,00%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Capaian Penyusunan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	100,00%	100,00%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100,00%	100,00%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100,00%	100,00%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,00%	100,00%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100,00%	100,00%
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100,00%	100,00%
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100,00%	100,00%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah		
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100,00%	100,00%
Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	100,00%	100,00%	
Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	100,00%	100,00%	
II	Program Informasi dan Komunikasi Publik		
	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	100,00%	100,00%
	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	100,00%	100,00%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	100,00%	100,00%	
III	Program Aplikasi Informatika		
	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Capaian s/d 2023
	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,00%	100,00%
	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	100,00%	100,00%
IV	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		
	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	100,00%	100,00%
V	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi		
	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	100,00%	100,00%

f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor Penyebab Berdasarkan uraian pada sub bab 2.1.3, maka dapat diambil kebijakan / tindakan sebagai berikut :

1. Menyusun kembali program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja.
2. Menyusun kembali penetapan target kinerja sesuai dengan kondisi dan kemampuan anggaran tahun berjalan.

Adapun Tabel Hasil Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik s/d Tahun 2022 Kabupaten Bangka, dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik s/d

Tahun 2023 Kabupaten Bangka
Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD Terhadap RKPD
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV Tahun 2023

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2	4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16	
		URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			35.452.271.779		13.396.634.674		9.714.851.668			8.993.978.711		22.390.613.385		63,16	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi PD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP PD	29,25	17.946.899.179	28,80	7.998.613.174	29,25	5.383.574.978	29,25		4.767.117.726	29,25	12.765.730.900	100	71,13	DIN KOMINFOTIK
			Nilai aspek pelaporan	10,25		9,62		10,25		10,25		10,25		100			
			Persentase temuan	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100			
			Indeks Profesionalisme	67,76		65,86		67,76		67,76		67,76		100			
			Indeks Tata Laksana	1,25		1,05		1,25		1,25		1,25		100			
			Persentase Pemenuhan	100		100,00		100		100		100		100			
			Indeks Sarana dan	100		90,00		12,75		12,75		12,75		12,75			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang Disusun Sesuai Standar (%)	100	163.189.004	100	127.054.849	100	130.334.320	100		129.329.048	100	256.383.897	100	157,11	DIN KOMINFOTIK
			Persentase Pelaporan	100		100		100		100		100		100			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	Jumlah dokumen perencanaan PD	21	33.099.669	14	74.496.199	6	53.834.320	100	6	53.516.225	20	128.012.424	95,24	386,75	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	5	22.750.000			5	19.850.000	60,00	3	19.575.000	3	19.575.000	60,00	86,04	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan	2	7.050.000			2	7.050.000	50,00	1	7.050.000	1	7.050.000	50,00	100,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	2	11.150.000			2	11.150.000	50	1	10.737.823	1	10.737.823	50,00	96,30	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan	2	11.150.000			2	11.150.000	50,00	1	11.150.000	1	11.150.000	50,00	100,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan	60	51.139.335	40	52.558.650	4	7.050.000	50,00	2	7.050.000	42	59.608.650	70,00	116,56	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD	8	26.850.000			8	20.250.000	62,50	5	20.250.000	5	20.250.000	62,50	75,42	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan yang disusun	100	12.996.982.883	100	5.583.304.513	100	3.454.509.143	100		2.944.823.710	100	8.528.128.223	100	65,62	DIN KOMINFOTIK
			Persentase	100		100	-	100		100		100		100			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan	36	12.974.932.883	24	5.583.304.513	12	3.432.459.143	100	12	2.923.486.961	36	8.506.791.474	100,00	65,56	
			Jumlah Laporan Keuangan	114		76	-	38		100	38	-	114	-	100,00		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2	22.050.000			2	22.050.000	100	2	21.336.749	2	21.336.749	100,00	96,77	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2	4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang Memperoleh Sertifikat	52,00	133.950.000	18,00	9.800.000	52,00	56.093.180	52		56.093.180	18,00	65.893.180	34,62	49,19	DIN KOMINFOTIK
			Persentase Aparatur yang	100		100	-	100		100		100		100			
			Persentase aparatur yang	100		100	-	100		100		100		100			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut	48	33.950.000	16	9.800.000	1	9.750.000	100	1	9.750.000	17,00	19.550.000	35,42	57,58	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (kali)	15	100.000.000	0	-	5	46.343.180	100	5	46.343.180	5,00	46.343.180	33,33	46,34	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100	604.457.880	100	327.437.907	100	308.652.355	100		303.640.033	100	631.077.940	100	104,40	DIN KOMINFOTIK
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	36	589.007.880	24	327.437.907	12	293.202.355	100	12	291.170.041	36	618.607.948	100,00	105,03	
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	12	15.450.000			12	15.450.000	100	12	12.469.992	12	12.469.992	100,00	80,71	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat daerah	80,00	427.543.650	70,00	-	80,00	352.543.650	80,00		322.745.000	70,00	322.745.000	87,50	75,49	DIN KOMINFOTIK
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4	1	277.050.000			1	277.050.000	100	1	248.845.000	1	248.845.000	100,00	89,82	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (paket)	3	75.000.000	0	-	0,00	-	0,00	0	-	0,00	-	0,00	0,00	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang	1	75.493.650			1	75.493.650	100	1	73.900.000	1	73.900.000	100,00	97,89	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang	100	2.832.868.962	100	1.659.931.505	100	676.539.140	75,00		624.328.707	100	2.284.260.212	100	80,63	DIN KOMINFOTIK
			Jumlah Aspek Layanan	5		3	-	2		2		3		60,00			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan	36	2.068.824.475	24	1.232.070.628	12	425.364.770	100	12	417.574.962	36	1.649.645.590	100,00	79,74	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan	36	449.132.742	24	273.111.365	12	173.524.500	100	12	130.568.209	36	403.679.574	100,00	89,88	
			Jumlah Layanan Updating	36		24	-	0		0,00	0	-	24	-	66,67		
			Jumlah Layanan Updating	36		24	-	0		0,00	0	-	24	-	66,67		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	36	314.911.745	24	154.749.512	12	77.649.870	100	12	76.185.536	36	230.935.048	100,00	73,33	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik (%)	100	787.906.800	100	291.084.400	100	404.903.190	100		386.158.048	100	677.242.448	100	85,95	DIN KOMINFOTIK
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara (unit)	33	467.769.200	22	258.956.900	11	175.031.190	100	11	162.882.618	33	421.839.518	100,00	90,18	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang	3	89.237.600	2	32.127.500	1	29.272.000	100	1	23.112.800	3	55.240.300	100,00	61,90	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)	3	230.900.000	0	-	1	200.600.000	100	1	200.162.630	1,00	200.162.630	33,33	86,69	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										91,55		88,55		74,93	78,72		
Predikat Kinerja										ST		T		S	T		

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2	4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16	
2	Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase regulasi yang Diimplementasikan OPD di bidang Kominfotik (%)	100	8.573.649.400	100	3.356.455.412	100	1.676.878.710	100		1.646.992.731	200	5.003.448.143	200	58,36	DIN KOMINFOTIK
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	98,00	8.573.649.400	78,61	3.356.455.412	98,00	1.676.878.710	98		1.646.992.731	176,61	5.003.448.143	180,21	58,36	
		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil	1000	4.525.547.900	600	429.089.449	1	216.865.000	100	1	200.125.000	601	629.214.449	60,10	13,90	
		Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil	2	21.490.000			2	21.490.000	100	2	18.492.473	2	18.492.473	100,00	86,05	
		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah SAPRAS yang Tersedia (paket)	3	1.366.165.000	2	874.119.596	0	565.957.610	0,00	0	557.200.543	2	1.431.320.139	66,67	104,77	
			Jumlah Sumber Daya	9		3	-	12		100	12	-	15		166,67		
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam	100	2.660.446.500	60	2.053.246.367	3	872.566.100	100	3	871.174.715	63	2.924.421.082	63,00	109,92	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00		98,22			77,95	78,66	
Predikat Kinerja										ST		ST			T	T	
3	Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang	58,82	8.931.723.200	54,38	2.041.566.088	58,82	2.654.397.980	58,82		2.579.868.254	58,82	4.621.434.342	100,00	51,74	DIN KOMINFOTIK
		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah daerah Kab/Kota	Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Terintegrasi	58,82	1.930.326.400	0,00	-	58,82	1.930.326.400	58,82		1.890.402.015	58,82	1.890.402.015	100,00	97,93	
		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemda	40	1.930.326.400			40,00	1.930.326.400	100	40	1.890.402.015	40,00	1.890.402.015	100,00	97,93	
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Regulasi yang Diterbitkan di Bidang Tata Kelola TIK (%)	100	7.001.396.800	100	2.041.566.088	100	724.071.580	100		689.466.239	100,00	2.731.032.327	100	39,01	
		Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,1	5.671.623.550	1,85	1.962.705.989	4	101.350.000	100	4	90.091.512	5,85	2.052.797.501	188,71	36,19	
		Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah	Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan Sistem	1	160.873.250			1	380.873.250	100	1	367.265.814	1	367.265.814	100,00	228,30	
		Pengembangan dan Pengolahan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan	15	1.127.180.000	10	78.860.099	1	200.128.330	100	1	191.425.059	11	270.285.158	73,33	23,98	
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan	1	41.720.000			1	41.720.000	100	1	40.683.854	1	40.683.854	100,00	97,52	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100		97,19			112,41	96,16	
Predikat Kinerja										ST		ST			ST	ST	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2	4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									9.714.851.668		8.993.978.711	22.390.613.385					
Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Urusan Komunikasi dan Informatika (%)										97,18		92,58		88,43	63,16		
Predikat Kinerja Seluruh Program Urusan Komunikasi dan Informatika										ST		ST		T	R		
		URUSAN PEMERINTAH BIDANG STATISTIK		955.613.840		33.400.600		84.042.290			61.533.768		94.934.368		9,93		
1		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Dokumen Data Statistik Daerah	100	955.613.840	100	33.400.600	100	84.042.290	100		61.533.768	200	94.934.368	200	9,93	DIN KOMINFOTIK
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia	100	955.613.840	100	33.400.600	100	84.042.290	100		61.533.768	100	94.934.368	100	9,93	
		Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang dihimpun	15	912.322.700	10	33.400.600	34	40.377.100	100	34	29.417.000	44	62.817.600	293,33	6,89	
		Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Statistik Daerah yang Terintegrasi	34	43.291.140			34	43.665.190	100	34	32.116.768	34	32.116.768	100,00	74,19	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100		73,22		293,33	9,93		
Predikat Kinerja										SR		SR		ST	SR		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM URUSAN STATISTIK									84.042.290		61.533.768		94.934.368				
Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Urusan Statistik(%)										100		73,22		293,33	9,93		
Predikat Kinerja Seluruh Program Urusan Statistik										ST		S		ST	SR		
		URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERSANDIAN		1.092.216.950		38.492.681		48.764.000			39.122.934		77.615.615		7,11		
1	Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Tata Kelola Layanan Administrasi Pemerintahan dengan Manajemen yang	45,00	1.092.216.950	44,12	38.492.681	45,00	48.764.000	45,00		39.122.934	90,00	77.615.615	90,00	7,11	DIN KOMINFOTIK
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks KAMI (Kematangan)	2	1.092.216.950	1	38.492.681	2	48.764.000	2,00		39.122.934	3	77.615.615	3	7,11	
		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PD yang Telah menggunakan Layanan Keamanan Informasi	34	1.092.216.950	8	38.492.681	34	48.764.000	100	34	39.122.934	42	77.615.615	123,53	7,11	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100		80,23		123,53	7,11		
Predikat Kinerja										SR		SR		SR	SR		

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2	4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PERSANDIAN								48.764.000				39.122.934		77.615.615			
Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Urusan Persandian (%)										100,00		80,23				123,53	7,11
Predikat Kinerja Seluruh Program Urusan Persandian										ST		T				ST	SR
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DINKOMINFOTIK								9.847.657.958				9.094.635.413		22.563.163.368			
Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Dinkominfotik (%)										98,31		92,35				136,43	54,12
Predikat Kinerja Seluruh Program Dinkominfotik										ST		ST				ST	R
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																	
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten berikutnya*):																	

* Diisi oleh Kepala Bappeda

KEPALA DINAS

DISUSUN
Sungailiat, Januari 2024
KABUPATEN BANGKA

KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

DIEVALUASI
Sungailiat, Januari 2024
KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA

Drs. TEDDY SUDARSONO, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660819 199603 1 002

Ir. PAN BUDI MARWOTO, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19661214 199203 1 004

Analisis Kinerja Pelayanan PD

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan tahun 2023 Dinkominfo Kabupaten Bangkamenyelenggarakan 3 (tiga) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yaitu Unsur Komunikasi dan Informatika, Unsur Persandian serta Unsur Statistik. Secara lengkap pencapaian target kinerja Dinkominfo Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel T.C 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Bangka
Tahun 2019 - 2023

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah (%)					Realisasi Capaian (%)					Proyeksi (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	indeks e-government	2,5	2,7	-	-	-	2,7	0	-	-	-	
2	indeks keterbukaan informasi publik	60	70	-	-	-	60	0	-	-	-	
3	Persentase keamanan informasi publik	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	
4	persentase data statistik yang akuntabel	100	100	-	-	-	100	0	-	-	-	
5	Persentase layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi yg terintegrasi	0	0	44,12	50,00	58,82	0	0	60,53	96,55	100,00	

Dalam pencapaian target kinerja Renstra Dinkominfo 2019-2023 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut, yaitu:

1. Terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang telah menunjukkan capaian yang sesuai dengan target sampai dengan tahun 2022 yaitu persentase keamanan informasi publik dan Persentase layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi yg terintegrasi yang sesuai RPJMD.
2. Capaian atas indikator kinerja indeks e-government, indeks keterbukaan informasi publik dan persentase data statistik yang akuntabel, merupakan indikator kinerja dengan capaian yang belum sesuai dengan target Renstra.
3. Perkembangan kondisi dunia yang diwarnai dengan merebaknya wabah Covid-19 membawa perubahan luar biasa dalam tatanan kehidupan manusia. Terjadi berbagai penyesuaian sebagai antisipasi dan penanganan terhadap perkembangan kasus Covid-19. Kondisi ini yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

1. *Tingkat Pelayanan Dinkominfotik*

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe A Kabupaten Bangka, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika dan statistik yang menjadikewenangan Daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan/didelegasikan kepada Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang informasi, komunikasi publik, kehumasan, statistik, persandian, dan e-government;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang informasi, komunikasi publik, kehumasan, statistik, persandian, dan e-government;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang informasi, komunikasi publik, kehumasan, statistik, persandian, dan e-government;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pembinaan UPT;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang informasi, komunikasi publik, kehumasan, statistik, persandian, dan e-government; dan;
- g. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Selanjutnya dalam Perubahan Rencana Strategis Dinkominfotik Tahun 2019-2023 ditetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis yang pencapaiannya diukur dengan 2(dua) indicator kinerja utama yaitu:

1. Meningkatnya Kinerja Dinkominfotik yang efektif dan efisien;
2. Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

2. *Permasalahan dan Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinkominfotik*

Berdasarkan hasil review terhadap gambaran pelayanan Perangkat Daerah; sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika; implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah, dan implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah, dirumuskan isu strategis dalam pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka. Analisis isu-isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka untuk perencanaan jangka menengah daerah kurun 2019-2023 diidentifikasi melalui serangkaian proses. Dimulai dari identifikasi permasalahan menurut bidang, analisis lingkungan strategis, kemudian diperoleh daftar calon isu strategis. Selanjutnya dilakukan penilaian, dihasilkan daftar isu strategis sebagai berikut :

- a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM dalam bidang administrasi, statistic, persandian dan teknologi informatika.
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penyelenggaraan pelayanan publik.
- c. Belum tersedianya regulasi/kebijakan daerah guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang persandian, statistik dan komunikasi informasi publik.
- d. Belum optimalnya pelayanan e-Government.
- e. Belum optimalnya penyediaan dan pengelolaan data statistik sektoral dalam mendukung pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan.
- f. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan data / informasi pemerintah daerah belum layak / belum optimal.
- g. Belum optimalnya kinerja pelayanan komunikasi dan informasi
- h. Belum optimalnya Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah.
- i. Kurangnya pemahaman perangkat daerah dan masyarakat akan arti pentingnya data serta pengamanan data dan informasi.

- j. Pengadaan infrastruktur di Bidang TIK, Pembangunan infrastruktur TIK memerlukan biaya yang sangat besar dan waktu yang lama sehingga pembangunan infrastruktur ini menjadi skala prioritas Dinkominfo dalam jangka menengah dan panjang yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap guna terciptanya E-Government (Pemerintah berbasis Elektronik);
- k. Peran KIM yang belum maksimal sehingga mitra pemerintah yang menjadi penyambung pemerintah dengan masyarakat sampai tingkat desa;
- l. Desiminasi infrastruktur pembangunan pemda yang belum maksimal tersampaikan kepada masyarakat sehingga perlu adanya inovasi selain kegiatan pameran pemda dan media informasi yang belum berbasis TIK;
- m. Masih banyaknya permohonan pengaduan ke komisi informasi yang belum terselesaikan di PPID Pembantu dan pelayanan yang belum berbasis TIK;
- n. Data statistik yang dilaksanakan kerjasama dengan BPS perlu diadakan evaluasi untuk keakuratan datanya dan data statistik yang berbasis website belum terbangun.

Analisis terhadap isu strategis pada Dinas Kominfo Kabupaten Bangka dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

a. Lingkungan Internal

a) Kekuatan

- 1) Komitmen Pimpinan Daerah dalam penerapan e-government. Hal ini ditunjukkan dengan penertiban email perangkat daerah dan optimalisasi penggunaan email tersebut dalam penyampaian informasi, juga mendesak terwujudnya command centre dalam rangka pengendalian dan percepatan komunikasi dan informasi internal pemerintah kabupaten serta dengan publik;
- 2) Ketersediaan infrastruktur untuk memulai pembangunan teknologi informasi dan komunikasi. Saat ini telah tersedia infrastruktur yang memadai dan kapasitas internet yang dinilai saat ini mampu mendukung runningnya aplikasi utama di Pemerintah Kabupaten Bangka (e-planning, e-budgeting/sipkd, eperijinan/sipadu, pajak online, dsb).
- 3) Kerjasama yang baik dengan stakeholder bidang teknologi informasi dan komunikasi. Pemerintah Kabupaten Bangka melalui Dinas Kominfo Kabupaten Bangka melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam membangun dan mengembangkan e-government.

b) Kelemahan

- 1) Komitmen dan Keterlibatan pejabat dalam workflow aplikasi. Bahwa proses penerapan sebuah aplikasi pada setiap perangkat daerah terlihat hanya menjadi urusan middle management hingga

ke staff. Top management disetiap perangkat daerah tidak banyak yang mau terlibat aktif atau punya keinginan yang kuat untuk turut menguasainya.

- 2) Minimnya penguasaan IT dikalangan PNS (Tingkat Literasi TIK). Minimnya kualifikasi PNS dibidang IT dan jumlah PNS yang menguasai IT yang tidak banyak juga mempengaruhi progress atau proses pengembangan e-government.
- 3) Internalisasi perubahan paradigma pengelolaan proses kerja dari manual ke elektronik di setiap perangkat daerah. Penguatan daya terima terhadap sebuah perubahan di masing-masing perangkat daerah seringkali tidak mengkrystal dikalangan pimpinan maupun staf. Bahwa setiap perubahan akan menimbulkan resistensi. Upaya meminimalisir resistensi yang ada dapat dilakukan dengan internalisasi perubahan itu sendiri.

b. Lingkungan Eksternal

a) Peluang

- 1) Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan daya saing daerah. Tidak dapat dipungkiri kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesatnya mempenetrasi proses kerja yang ada di birokrasi pemerintah daerah. Percepatan proses (efisien dan efektif) secara waktu, transparansi, akuntabel menjadi nilai yang dituju dengan kemajuan itu.
- 2) Peraturan perundang-undangan di bidang Komunikasi dan Informatika yang semakin komprehensif. Saat ini belum tersedianya produk hukum bidang komunikasi dan informasi, persandian, statistic mulai dari undang-undang hingga peraturan menteri atau kepala lembaga negara yang menangani urusan tersebut dalam memberikan petunjuk teknis kepada pemerintah daerah.
- 3) Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Salah satunya Program Percepatan Reformasi Birokrasi adalah Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik. Dengan menjadi bagian utama system pemerintahan eletronik dalam reformasi birokrasi menunjukkan bahwa e-government telah menjadi sebuah keniscayaan dari perubahan besar yang ingin dicapai secara nasional.

b) Ancaman/Tantangan

- 1) Semakin tingginya tuntutan publik terhadap layanan informasi publik yang akurat dan mudah diakses. Masyarakat semakin menunjukkan partisipasinya dalam mengontrol pemerintah dengan semakin tingginya nilai- nilai kritis yang disampaikan sebagai pengguna layanan public.
- 2) Masih adanya ego-sektoral antar Organisasi Perangkat Daerah terutama dalam hal sharing data dan informasi. Belum adanya kesamaan cara pandang bagi perangkat daerah terhadap

pentingnya integrasi data, maka hal tersebut akan mempengaruhi proses pembangunan data centre yang menjadi pekerjaan rumah Dinas Kominfo Kabupaten Bangka kedepannya.

- 3) Semakin tingginya kriminalitas di bidang teknologi informasi dan komunikasi (cyber crime). Bahwa hari ini perangkat daerah beramai-ramai mendisain dan membangun aplikasi atau system informasi, namun tidak dibarengi dengan kesadaran atau pemahaman untuk melakukan upaya pengamanan informasi atau data yang terdapat pada aplikasi/system informasi tersebut.

Secara struktur organisasi, struktur organisasi Dinkominfo saat ini berada dalam bentuk yang relatif sesuai dalam arti cakupan bidang tugas dan fungsinya telah memenuhi kriteria organisasi yang disyaratkan. Keberadaan Sekretariat dan empat bidang (Bidang IKP, Bidang E-Government, Bidang Persandian dan Bidang Statistik) relatif sesuai dan dapat mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dan penyediaan data, walaupun membawakonsekuensi luas dalam aspek SDM dan fasilitas. Akan tetapi memperhatikan perkembangan kebijakan Pemerintah Pusat dalam urusan kebijakan penyetaraan jabatan structural kedalam jabatan fungsional pada tahun 2021, memungkinkan Dinkominfo untuk dapat mengevaluasi struktur organisasi saat ini, utamanya dalam menyelaraskan tugas pokok dan fungsi pada level bidang dengan nomenklatur kegiatan yang mengacu pada Kepmendagri nomor 050-5889 Tahun 2021.

3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinkominfo

Dalam usaha pencapaian tujuan dan sasaran, beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Dinkominfo

adalah sebagai berikut:

1. Pentingnya peran Dinkominfo yang didukung oleh peraturan yang berlaku;
2. Tingginya kepercayaan Bupati dan OPD terhadap keberadaan Dinkominfo dalam hal penyebaran informasi pembangunan daerah;
3. Kualitas SDM Dinkominfo yang handal dan memadai sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas yang diberikan;
4. Pengguna teknologi informasi dalam pelaksanaan penyebaran informasi pembangunan daerah dengan tetap mengikuti perkembangan teknologi tersebut;
5. Tersedianya sarana dan prasarana teknologi yang memadai;
6. Tersedianya peraturan yang mendukung kegiatan dan evaluasi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai urusannya yang dilaksanakannya, terdapat faktor penghambat dan pendorong sebagai berikut :

Tabel 2.5.
Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinkominfo

No	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Ketimpangan tingkat literasi digital masyarakat masih tinggi	a. Literasi digital masyarakat perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan. b. Program kegiatan yang mendukung peningkatan literasi digital masyarakat terutama di pedesaan sehingga seluruh masyarakat dapat teredukasi dan memperoleh akses atas informasi publik, layanan dasar dan program strategis Pemerintah.
2.	Belum adanya integrasi dan kolaborasi tata kelola SPBE antar OPD	a. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
3.	Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang belum handal	a. Dukungan Sumber Daya Manusia dengan kualitas personil yang menunjang kinerja organisasi
4.	Penerapan Sistem Keamanan Informasi belum Optimal	a. Adanya peralatan kontra penginderaan yang di pinjam pakai dari BSSN.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses yang dilakukan

Proses yang dilakukan dengan membandingkan antar rancangan awal Renja 2025 pada Renstra 2024-2026 dengan rancangan akhir Renja 2025 (Permendagri nomor 90 tahun 2019).

Penjelasan mengenai alasan proses yang dilakukan

Dalam melakukan review terhadap Rancangan awal Renja 2025 dengan Permendagri 90 tahun 2019 adalah :

- Membandingkan antar rancangan awal Renja 2025 (pada Renstra 2024-2026) dengan rancangan akhir Renja 2025 (Permendagri 90/2019)
- Melakukan Pemetaan Program dan indikator program
- Melakukan pemetaan Kegiatan dan indikator program
- Melakukan pemetaan Sub Kegiatan dan indikator Sub Kegiatan
- Melakukan pemetaan Rekening Program dan kegiatan yang lamadan rekening baru

Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal.

Setelah melakukan pemetaan dengan membandingkan antar rancangan awal Renja 2025 (pada Renstra 2024-2026) dengan rancangan akhir Renja 2025 (Permendagri 90/2019) pada urusan Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka dirumuskan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), dapat disajikan tabel T.C 31 berikut ini.

Tabel T.C 31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Bangka

Rancangan Awal RKPD TAHUN 2025				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2025		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2025		
		Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3	4	1	2	3	4	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6.787.943.680	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.147.746.980	
	<i>Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah</i>	29	27.994.835		<i>Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah</i>	29	15.000.000	
	<i>Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah</i>	10			<i>Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah</i>	10	20.000.000	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			27.994.835	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			15.000.000	
	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100%	16.994.945		Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100%	15.000.000	
	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100%	10.999.890		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100%	20.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja yang disusun	7 Dokumen	10.999.890	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja yang disusun	7 Dokumen	20.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja yang disusun	20 Dokumen	16.994.945	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja yang disusun	20 Dokumen	15.000.000	
	<i>Persentase temuan pengelolaan keuangan dalam</i>	0%	4.311.911.230		<i>Persentase temuan pengelolaan keuangan</i>	0%	3.919.919.300	

	<i>LHP BPK-RI</i>				<i>dalam LHP BPK-RI</i>			
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.311.911.230	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.919.919.300	
	Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar	100%			Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar	100%		
	Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar	100%	4.311.911.230		Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar	100%	3.919.919.300	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN yang tertangani	12 Bulan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN yang tertangani	12 Bulan		
	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	38 Dokumen	4.311.911.230		Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	38 Dokumen	3.919.919.300	
	<i>Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah</i>	<i>4,25</i>	<i>1.137.179.615</i>		<i>Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah</i>	<i>4,25</i>	<i>1.030.067.680</i>	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			941.436.815	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			891.587.650	
	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan	100%			Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan	100%		
	Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi	2	941.436.815		Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi	2	891.587.650	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Layanan Administrasi Persuratan yang Tertangani	12 Bulan	687.524.750	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Layanan Administrasi Persuratan yang Tertangani	12 Bulan	648.853.500	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan penyediaan internet, air dan listrik yang tertangani	12 Bulan	149.258.615	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan penyediaan internet, air dan listrik yang tertangani	12 Bulan	142.526.650	
	Jumlah Layanan Updating website yang tertangani	12 Bulan			Jumlah Layanan Updating website yang tertangani	12 Bulan		
	Jumlah Layanan Updating Pengaduan Masyarakat yang tertangani	12 Bulan			Jumlah Layanan Updating Pengaduan Masyarakat yang tertangani	12 Bulan		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	104.653.450	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	100.207.500	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			195.742.800	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			138.480.030	
	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100%	195.742.800		Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100%	138.480.030	

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Layanan Penyediaan Makanan dan Minuman yang Tertangani	12 Bulan	195.742.800	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Layanan Penyediaan Makanan dan Minuman yang Tertangani	12 Bulan	138.480.030	
	Jumlah Layanan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah yang Tertangani	12 Bulan			Jumlah Layanan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah yang Tertangani	12 Bulan		
	<i>Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	12,5	1.185.108.000		<i>Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	12,5	162.760.000	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			800.000.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	
	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	70%	800.000.000		Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	70%	-	
<i>Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</i>	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	1 Paket	100.000.000	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</i>	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	1 Paket	-	
<i>Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</i>	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	1 Paket	100.000.000	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</i>	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	1 Paket	-	
<i>Sub Kegiatan Pengadaan Mebeleur</i>	Jumlah mebel kantor yang diadakan	1 Paket	100.000.000	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Mebeleur</i>	Jumlah mebel kantor yang diadakan	1 Paket	-	
<i>Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional</i>	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	1 Paket	500.000.000	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional</i>	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	1 Paket	-	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			385.108.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			162.760.000	
	Persentase Profesionalisme Aparatur Perangkat Daerah	100%	385.108.000		Persentase Profesionalisme Aparatur Perangkat Daerah	100%	162.760.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara	1 Paket	155.452.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara	1 Paket	141.320.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara	1 Paket	29.656.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara	1 Paket	21.440.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Direhap	1 Unit	200.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Direhap	1 Unit	-	
	<i>Indeks Profesionalisme Aparatur Lingkup Perangkat</i>	67	125.750.000		<i>Indeks Profesionalisme Aparatur Lingkup</i>	67	-	

	Daerah			Perangkat Daerah				
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			125.750.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	
	Persentase Profesionalisme Aparatur Perangkat Daerah	100%	125.750.000		Persentase Profesionalisme Aparatur Perangkat Daerah	100%	-	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Adat yang Tersedia	66 Stel	65.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Adat yang Tersedia	66 Stel	-	
	Jumlah Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya yang tersedia	66 Stel	48.750.000		Jumlah Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya yang tersedia	66 Stel	-	
	Jumlah Pakaian Olahraga yang tersedia	16 Stel	12.000.000		Jumlah Pakaian Olahraga yang tersedia	66 Stel	-	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	5 Orang	50.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	5 Orang	-	
	Indeks SPBE	3,1			Indeks SPBE	3,1		
		10				10		
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			3.500.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			1.441.662.500	
	Persentase regulasi yang Diimplementasikan OPD di bidang Kominfotik	100%	3.500.000.000		Persentase regulasi yang Diimplementasikan OPD di bidang Kominfotik	100%	1.441.662.500	
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			3.500.000.000	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			1.441.662.500	
	Persentase Informasi Publik yang disampaikan kepada masyarakat	100%	3.500.000.000		Persentase Informasi Publik yang disampaikan kepada masyarakat	100%	1.441.662.500	
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Informasi Publik yang disampaikan kepada masyarakat	500 Konten	1.000.000.000	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Informasi Publik yang disampaikan kepada masyarakat	500 Konten	173.216.000	
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Saprass yang tersedia	1 Paket	500.000.000	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Saprass yang tersedia	1 Paket	450.495.000	
	Jumlah SDM Komunikasi Publik yang Bersertifikat	3 Orang			Jumlah SDM Komunikasi Publik yang Bersertifikat	3 Orang		
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Kerjasama Media	30 Media	2.000.000.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Kerjasama Media	30 Media	817.951.500	
	Jumlah KIM	25 KIM			Jumlah KIM	25 KIM		
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			3.000.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			1.530.035.820	

	Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Terintegrasi	50,00%	3.000.000.000		Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Terintegrasi	50,00%	1.530.035.820	
Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			3.000.000.000	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			1.530.035.820	
	Persentase Layanan Informasi Berbasis TIK	100%	3.000.000.000		Persentase Layanan Informasi Berbasis TIK	100%	1.530.035.820	
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks SPBE	3,1	2.500.000.000	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks SPBE	3,1	1.465.875.820	
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi yang dikembangkan	5 Aplikasi	500.000.000	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi yang dikembangkan	5 Aplikasi	64.160.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			425.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			27.706.650	
	Persentase Dokumen Data Statistik Daerah yang Tepat Waktu	100%	425.000.000		Persentase Dokumen Data Statistik Daerah yang Tepat Waktu	100%	27.706.650	
Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			425.000.000	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			27.706.650	
	Persentase data Statistik Sektoral yang Digunakan Perangkat Daerah	100%	425.000.000		Persentase data Statistik Sektoral yang Digunakan Perangkat Daerah	100%	27.706.650	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Data Statistik Sektoral	5 Data	400.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Data Statistik Sektoral	5 Data	27.706.650	
Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM Statistik yang Bersertifikat	1 Orang	25.000.000	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM Statistik yang Bersertifikat	5 Data	-	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			500.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			36.700.000	
	Persentase Tata Kelola Layanan Administasi Pemerintahan dengan Manajemen yang terdokumentasi dan	40,00%	500.000.000		Persentase Tata Kelola Layanan Administasi Pemerintahan dengan Manajemen yang terdokumentasi dan	40,00%	36.700.000	

	Terstandarasi				Terstandarasi			
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			500.000.000	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			36.700.000	
	Persentase Keamanan Informasi Perangkat Daerah	100%	500.000.000		Persentase Keamanan Informasi Perangkat Daerah	100%	36.700.000	
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Aplikasi yang telah dilakukan IT Security Assesment	4 Aplikasi	500.000.000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Aplikasi yang telah dilakukan IT Security Assesment	4 Aplikasi	36.700.000	
			14.212.943.680				8.183.851.950	

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPDD dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPDD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPDD. Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPDKabupaten Bangka adalah sebagai berikut:

1. Tidak terdapat penambahan jumlah program diluar Rancangan RKPDD.
2. Tidak terdapat penambahan jumlah kegiatan diluar Rancangan RKPDD.
3. Terdapat perubahan target output pada beberapa Sub Kegiatan antara Rancangan RKPDD dengan target output Sub Kegiatan hasil analisis kebutuhan perangkat daerah yang disebabkan analisis dalam penyusunan Rancangan yang belum tepat.
4. Terdapat perbedaan jumlah pagu antara Rancangan RKPDD dengan hasil analisis kebutuhan perangkat daerah sebagai tindak lanjut penyesuaian target output subkegiatan, penambahan jumlah kegiatan dengan tetap mempertimbangan proyeksi kemampuan keuangan daerah.

Hasil analisis kebutuhan perangkat daerah selanjutnya akan menjadi pertimbangan dalam penetapan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, target kinerja serta batasan pagu yang akan dituangkan dalam Renja Dinkominfo Tahun 2025 dengan tetap mempedomani Renstra Dinkominfo Tahun 2024-2026 dan RKPDKabupaten Bangka Tahun 2025.

Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka merupakan Organisasi Pemerintah Daerah yang menangani urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Proses penjaringan usulan masyarakat dimulai dari musrenbang kecamatan, forum PD dan musrenbang Kabupaten, terdapat satu usulan dari masyarakat yang telah diakomodir dalam Renja Dinas Kominfotik sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel T.C 32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Bangka

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	<p>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</p> <p>Kegiatan Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah</p>	<p>Desa Bakam, Kec. Bakam</p> <p>Desa Banyu Asin Kec. Riau Silip</p>	<p>Persentase Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) pada cakupan layanan SPBE</p> <p>Nilai domain kebijakan internal</p> <p>Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah</p>	Rp. 100.000.000	Penambahan Jaringan Hotspot

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, Tema RKPTahun2024 adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan ibu kota nusantara, serta (8) pelaksanaan pemilu 2024

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2024 selanjutnya dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKPTahun2024. Tujuh PN merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dipertahankan pada RKPTahun2024. Ketujuh PN RKP Tahun2024 dimaksud adalah sebagai berikut:

1. **Prioritas Nasional 1: Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan**, dengan Program Prioritas sebagai berikut:
 - a. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT).
 - b. Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
 - c. Peningkatan Ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan
 - d. Peningkatan Pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
 - e. Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi
 - f. Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi
 - g. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
 - h. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi

2. **Prioritas Nasional 2: Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan**, dengan Program Prioritas sebagai berikut:
 - a. Pembangunan Wilayah Sumatera
 - b. Pembangunan Wilayah Jawa-Bali
 - c. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara
 - d. Pembangunan Wilayah Kalimantan
 - e. Pembangunan Wilayah Sulawesi
 - f. Pembangunan Wilayah Maluku
 - g. Pembangunan Wilayah Papua

3. **Prioritas Nasional 3: Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing** dengan Program Prioritas sebagai berikut:
 - a. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan;
 - b. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Nasional Meningkatkan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;
 - c. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Memperkuat Pelaksanaan Perlindungan Sosial;
 - d. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
 - e. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
 - f. Pengentasan Kemiskinan
 - g. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing

4. **Prioritas Nasional 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan** dengan Program Prioritas sebagai berikut:
 - a. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter
 - b. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia
 - c. Memperkuat Moderasi Beragama untuk mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial
 - d. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter

5. **Prioritas Nasional 5: Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar** dengan program Prioritas sebagai berikut:
 - a. Infrastruktur pelayanan dasar;
 - b. Infrastruktur Ekonomi;
 - c. Infrastruktur Perkotaan;
 - d. Energi dan Ketenagalistrikan
 - e. Transformasi digital;

6. **Prioritas Nasional 6: Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim, dengan Program Prioritas:**
 - a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim.; dan
 - c. Pembangunan rendah karbon.

7. **Prioritas Nasional 7: Stabilitas politik, hukum dan transformasi pelayanan publik** Program Prioritas sebagai berikut:
 - a. Konsolidasi demokrasi;
 - b. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;

- c. Penegakan Hukum Nasional;
- d. Reformasi birokrasi dan tata kelola;
- e. Menjaga stabilitas keamanan Nasional.

Berdasarkan Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2024 diatas dan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik yaitu mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika dan statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan/didelegasikan kepada Daerah, Dinkominfo Kabupaten Bangka mendukung pelaksanaan RKP Tahun 2024 pada prioritas nasional ke-tujuh dengan Program Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dengan indikator kinerja nasional “Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor B Keatas terhadap SAKIP (%)”. Dukungan terhadap tema, strategi, arah kebijakan dan prioritas nasional tahun 2024 dilaksanakan melalui peningkatan sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan antara Pusat dan Daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran dari RPD dan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah yang memuat rancangan kerangka ekonomi, rencana kerja dan pendanaan, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, tentunya harus memperhatikan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Hal ini ditujukan demi tercapainya sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2024 tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dengan Tema “**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**”.

Dinkominfo sebagai unsur penunjang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan dituntut untuk dapat menterjemahkan dan mensinergikan prioritas pembangunan antara provinsi dan daerah. Adapun sinkronisasi prioritas pembangunan daerah, provinsi dan pusat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan
Kabupaten Bangka Tahun 2024

Nasional	Prov.Kep.babel	Kab.Bangka
1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstre.	- Penguatan dan peningkatan perekonomian daerah	- Pembangunan pariwisata, pertanian, perikanan, agroindustri dan UMKM
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan	- Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM	- Pembangunan pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial yang berkeadilan
3. Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan descent job	- Peningkatan partisipasi publik dan tata kelola pemerintahan	- Penguatan infrastruktur dan konektivitas akses perekonomian
4. Mendorong pemulihan dunia usaha	- Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan antar masyarakat	- Peningkatan pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas	- Pembangunan Sosial	- Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana
6. Ekonomi hijau	- Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam	
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi		

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Bangka. Oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka berpedoman pada RKPD Kab.Bangka, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional 2019-2024, RKP Tahun 2024; maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Kep.Babel 2005–2025, RPD Provinsi Kep.Babel 2023–2026, RKPD Provinsi Kep.Babel 2024; dan RPD Kabupaten Bangka 2024-2026 dan RKPD Kabupaten Bangka 2024.

Kebijakan Nasional Pembangunan bidang komunikasi dan informatika 3 (tiga) tahun ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber

daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Renstra tahun 2024—2026 akan berfokus membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, digitalisasi penyiaran televisi, dan Government Public Relations (GPR).

Tujuan dan Sasaran Renja PD

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026, Tema Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Rancangan RKP Kabupaten Bangka Tahun 2024 adalah Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia menuju Pembangunan Ekonomi Inklusif dengan 5 (lima) prioritas pembangunannya yaitu:

- 1) Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Sosial yang Berkeadilan,
- 2) Industri, Pertanian, UMKM dan Pariwisata,
- 3) Reformasi Birokrasi,
- 4) Pembangunan Infrastruktur dan;
- 5) Pengelolaan Lingkungan Hidup. Keterkaitan antara Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 3.1.
Keterkaitan Antara Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangka Tahun 2024 dengan Sasaran Pembangunan

Tema: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju Pembangunan Ekonomi Inklusif		
No.	Prioritas	Sasaran
1.	Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Sosial yang Berkeadilan	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk Meningkatnya Kualitas Perempuan dan Anak
2.	Industri, Pertanian, UMKM, dan Pariwisata	Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Meningkatnya Jumlah Uang yang Dibelanjakan Wisatawan
3.	Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat
4.	Pembangunan Infrastruktur	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur
5.	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Dalam rangka dukungan terhadap pencapaian tema, prioritas dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 sebagaimana tersebut diatas dan dengan tetap mengacu kepada Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026, maka tujuan dan sasaran beserta target kinerja yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja Dinkominfotik Tahun 2024 disajikan pada Tabel 3.2. Tujuan dan sasaran Dinkominfotik pada tahun 2024 diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan ke-3 dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka, yaitu Reformasi Birokrasi dengan sasaran pembangunan meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi.

Tabel 3.2.
Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan/Sasaran dan Target Renja Dinkominfotik Tahun 2025

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TAHUN 2024
I.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi		Indeks SPBE	2,45
		Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi	Persentase Layanan Teknologi Informasi melalui SPBE	83,33
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Keterbukaan Informasi dan Data	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,00
II	Meningkatkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi PD	33,37
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	BB (80,00)

Tujuan dan sasaran dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Kabupaten Bangka Tahun 2024 adalah :

- Menjabarkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dalam rencana Program/Kegiatan Prioritas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2024;
- Menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2024;
- Menjadi acuan bagi seluruh Bidang dan Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, karena memuat kebijakan publik;

- d. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan antara Bidang dan Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka;
- e. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka;

Adapun tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinkominfo dan Statistik dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan yang Akuntabel
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra.

Adapun sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Meningkatkan Layanan Teknologi Informasi
- 3) Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Keterbukaan Informasi dan Data

Program dan Kegiatan

Program adalah himpunan dari beberapa kegiatan yang nyata, terpadu dan sistematis yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen yang terdapat dan menjadi bagian dari suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam penyusunan program untuk mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka menetapkan beberapa kriteria sebagai landasan pertimbangan, antara lain :

- a. Memperhatikan Tupoksi dari masing-masing Bidang;
- b. Memperhatikan program Pemerintah Kabupaten Bangka, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- c. Mempertimbangkan hasil evaluasi program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, saat ini dan akan datang;
- d. Memperhatikan skala prioritas dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi, baik Dinkominfo dan Statistik maupun Pemkab Bangka.

Program dan kegiatan dimaksud oleh Dinkominfotik Kab. Bangka telah disusun yang terdiri dari 5 program dan 11 kegiatan sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
 - Sub Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pengadaan Mebeleur
 - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

II. Program Informasi dan Komunikasi Publik

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
 - Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

- Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik

III. Program Aplikasi Informatika

1. Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

IV. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral
- Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi

V. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

BAB IV

RENCANA KERJA dan PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1..Rencana Kerja

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka mengampu Urusan Unsur Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Program-program Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka pada Tahun 2025 mendukung prioritas pembangunan “Reformasi Birokrasi” sebagaimana tertuang pada RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2025. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kab.Bangka
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab.Bangka**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6		7	8	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				6.137.905.710,00	APBD		6.581.022.910,00	
		Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah		29,00	204.324.220,00			29,53	204.324.220,00
		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah		12,75				13,00	

		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dalam LHP-BPK RI		0,00	4.152.307.000,00			0,00	4.152.307.000,00
		Indeks Profesionalisme Aparatur Perangkat Daerah		68,00	60.350.000,00			70,00	60.350.000,00
		Indeks kepuasan pelayanan Jasa internal perangkat daerah		3,90	383.285.160,00			4,00	383.285.160,00
		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik		1,00	1.337.639.330,00			1,00	1.780.756.530,00
2.16.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	Kab. Bangka	100%	204.324.220,00			100%	204.324.220,00
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar		100%				100%	
2.16.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	Kab. Bangka	17 dokumen	138.224.220,00			6 dokumen	138.224.220,00
2.16.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang disusun	Kab. Bangka	12 laporan	66.100.000,00			4 laporan	66.100.000,00

2.16.01.2.0 2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Kab. Bangka	100%	4.152.307.000,00			100%	4.152.307.000,00
2.16.01.2.02.01	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Kab. Bangka</i>	<i>26 orang/bulan</i>	<i>4.120.257.000,00</i>			<i>26 orang/bulan</i>	<i>4.120.257.000,00</i>
2.16.01.2.02.03	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD</i>		<i>900 dokumen</i>	<i>10.000.000,00</i>			<i>950 dokumen</i>	<i>10.000.000,00</i>
2.16.01.2.02.05	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>Kab. Bangka</i>	<i>18 laporan</i>	<i>22.050.000,00</i>			<i>12 laporan</i>	<i>22.050.000,00</i>
2.16.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi	Kab. Bangka	18%	60.350.000,00			18%	60.350.000,00
		Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu		100%				100%	
		Persentase aparatur yang penilaian kinerjanya baik		100%				100%	

2.16.01.2.05 .02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		1 paket	9.750.000,00	APBD		1 paket	9.750.000,00
2.16.01.2.05 .03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian		1 Dokumen	10.000.000,00			1 Dokumen	10.000.000,00
2.16.01.2.05 .09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		26 orang	40.600.000,00			26 orang	40.600.000,00
2.16.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan		100%	383.285.160,00			100%	383.285.160,00
		Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi		3				3	
5.01.01.2.06 .09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 laporan	357.835.160,00			12 laporan	357.835.160,00
5.01.01.2.06 .10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 Dokumen	10.000.000,00			1 Dokumen	10.000.000,00

5.01.01.2.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		12 dokumen	15.450.000,00			12 dokumen	15.450.000,00
2.16.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangka	80%	429.557.535,00			80%	872.674.735,00
2.16.01.2.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		5 unit	138.980.000,00			5 unit	138.980.000,00
2.16.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel kantor		1 unit	182.230.000,00			1 unit	182.230.000,00
2.16.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		-	-			-	-
2.16.01.2.07.09	Sub Kegiatan Pengadaan gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya		1 unit	-			1 unit	551.464.735,00
2.16.01.2.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		2 unit	108.347.535,00			-	-

2.16.01.2.07.11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		-	-			-	-
2.16.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangka	100%	671.852.655,00			100%	671.852.655,00
2.16.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bangka	12 Laporan	421.800.435,00			12 Laporan	421.800.435,00
2.16.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bangka	12 Laporan	173.150.450,00			12 Laporan	173.150.450,00
2.16.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bangka	12 Laporan	76.901.770,00			12 Laporan	76.901.770,00
2.16.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik		100%	236.229.140,00			100%	236.229.140,00

2.16.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Bangka	12 unit	174.657.140,00			12 unit	174.657.140,00
2.16.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Bangka	31 Unit	36.572.000,00			40 Unit	36.572.000,00
2.16.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bangka	1 Unit	25.000.000,00			1 Unit	25.000.000,00
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			100%	1.727.241.670,00	APBD		100%	1.737.241.670,00
		Indeks Keterbukaan Informasi Publik		75	1.727.241.670,00			85	1.737.241.670,00
02.16.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi dan dokumentasi yang dikelola	Kab. Bangka	100%	882.566.010,00			100%	892.566.010,00

02.16.02.2.0 1.04	Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kab. Bangka	4 dokumen	10.000.000,00			4 dokumen	10.000.000,00
	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Bangka	36 dokumen	10.000.000,00			36 dokumen	10.000.000,00
02.16.02.2.0 1.07	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Kab. Bangka	70 layanan	10.000.000,00			73 layanan	10.000.000,00
02.16.02.2.0 1.12	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Kab. Bangka	70 dokumen	852.566.010,00			73 dokumen	862.566.010,00
		Persentase permohonan informasi publik yang dilayani/ditindaklanjuti		100%	270.125.000,00			100%	270.125.000,00
02.16.02.2.0 1.06	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Kab. Bangka	12 Permohonan	270.125.000,00			12 dokumen	270.125.000,00
		Persentase informasi publik yang disampaikan melalui media		100%	29.590.000,00			100%	29.590.000,00
	Sub Kegiatan Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	Kab. Bangka	4 dokumen	29.590.000,00			4 dokumen	29.590.000,00

		Persentase sapras pendukung informasi publik yang tersedia		100%	10.000.000,00			100%	10.000.000,00
02.16.02.2.0 1.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	2 unit	10.000.000,00			2 unit	10.000.000,00
		Persentase SDM Komunikasi publik yang memiliki kompetensi		25%	534.960.660,00			50%	534.960.660,00
02.16.02.2.0 1.10	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Kab. Bangka	2 orang	534.960.660,00			2 orang	534.960.660,00
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				2.401.880.000,00	APBD			2.401.880.000,00
		Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah (JIP)		100,00%	2.099.450.020,00			100,00%	2.099.450.020,00
		Persentase Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) pada cakupan layanan SPBE		66,67	302.429.980,00			83,33	302.429.980,00

02.16.03.2.02	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Infrstruktur TIK dalam kondisi baik	Kab. Bangka	85	2.099.450.020,00			90	2.099.450.020,00
<i>02.16.03.2.01.03</i>	<i>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota</i>	<i>Kab. Bangka</i>	<i>34 PD</i>	<i>2.099.450.020,00</i>			<i>1 unit</i>	<i>2.099.450.020,00</i>
02.16.03.2.02	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai domain kebijakan internal	Kab. Bangka	3 Nilai	302.429.980,00			4 Nilai	302.429.980,00
	<i>Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Kab. Bangka</i>	<i>12 dokumen</i>	<i>54.920.090,00</i>			<i>12 dokumen</i>	<i>54.920.090,00</i>
<i>02.16.03.2.02.04</i>	<i>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah</i>	<i>Kab. Bangka</i>	<i>12 dokumen</i>	<i>10.000.000,00</i>			<i>12 dokumen</i>	<i>10.000.000,00</i>

02.16.03.2.0 2.08	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Kab. Bangka	5 aplikasi	10.000.000,00			5 layanan publik	10.000.000,00
02.16.03.2.0 2.03	Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Kab. Bangka	1 unit	10.000.000,00			1 unit	10.000.000,00
aplikasi	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Kab. Bangka	1 dokumen	10.000.000,00			1 dokumen	10.000.000,00
02.16.03.2.0 2.07	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Kab. Bangka	5 unit	10.000.000,00			5 unit	10.000.000,00
02.16.03.2.0 2.07	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi		1 Dokumen	197.509.890,00			5 aplikasi	197.509.890,00
2.20.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				166.370.230,00				166.370.230,00
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGAAN STATISTIK SEKTORAL				166.370.230,00	APBD			166.370.230,00

		Persentase Data Sektoral yang terintegrasi		58,82%	166.370.230,00			79,41%	166.370.230,00
		Persentase SDM statistik yang memiliki kompetensi		25,00	38.567.140,00			50,00	38.567.140,00
2.20.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data sektoral yang diolah dan dianalisis	Kab. Bangka	58,82%	127.803.090,00			79,41%	127.803.090,00
2.20.02.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Bangka	1 dokumen	65.930.000,00			1 dokumen	65.930.000,00
2.20.02.2.01.03	Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Kab. Bangka	34 dokumen	61.873.090,00			34 dokumen	61.873.090,00
2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kab. Bangka	1 orang	28.567.140,00			1 orang	28.567.140,00

2.20.02.2.01.04	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Kab. Bangka	2 orang	10.000.000,00			34 PD	10.000.000,00
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				386.628.624,80				386.628.624,80
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				145.922.090,00	APBD			135.922.090,00
		Indeks KAMI		Kematangan 1	145.922.090,00			Kematangan 1	135.922.090,00
		Nilai Kematangan Indeks KAMI		Kematangan 1	10.000.000,00			Kematangan 1	10.000.000,00
2.21.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kematangan Indeks KAMI	Kab. Bangka	Kematangan 1	135.922.090,00			Kematangan 1	125.922.090,00

2.21.02.2.01.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Bangka	2 Laporan	10.000.000,00			2 Laporan	10.000.000,00
2.21.02.2.01.04	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Kab. Bangka	34 perangkat daerah	125.922.090,00			34 perangkat daerah	115.922.090,00
2.21.02.2.01	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Teknologi Keamanan Informasi	Kab. Bangka	Kematangan 1	10.000.000,00			Kematangan 1	10.000.000,00
2.21.02.2.02.01	Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Kab. Bangka	34 perangkat daerah	10.000.000,00			34 perangkat daerah	10.000.000,00
JUMLAH									11.022.436.900,00
					10.579.319.700,00				

4.2..Pendanaan

Pada Tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka akan melaksanakan Urusan Unsur Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dengan total anggaran Rp. **10.579.319.700,00**.

Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan 3 urusan, 5 program dan 12 kegiatan. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka.

BAB V

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Dinkominfo Kabupaten Bangka disusun sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2025 yaitu “**Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Berwawasan Lingkungan dan Berkesinambungan**”, dan penjabaran dari tujuan Dinkominfo Kabupaten Bangka yang tertuang dalam Renstra yaitu “**Meningkatkan Tata Kelola Teknologi Informasi**” dan “**Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Keterbukaan Informasi dan Data**”.

Tujuan dan sasaran Renja Dinkominfo Tahun 2025 haruslah konsisten dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Dinkominfo yang telah dituangkan dalam Renstra Dinkominfo Tahun 2024-2026. Adapun tujuan Dinkominfo adalah “Meningkatkan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi” yang didukung oleh dua sasaran yaitu: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Dinkominfo dan Meningkatkan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pada tahun 2025 Dinkominfo akan melaksanakan Urusan Unsur Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dengan total anggaran Rp. 10.579.319.700,00. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan 3 urusan, 5 program dan 12 kegiatan. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di Dinkominfo dan lingkup Kabupaten Bangka.

Kaidah-Kaidah Pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka pelaksanaan renja tahun 2025, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan dan tindak lanjut supaya program dan kegiatan yang telah di rencanakan sesuai dengan harapan pembangunan. Adapun beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut:

1. Renja Diskominfo Kabupaten Bangka haruslah berpedoman kepada RKPD dan disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan propinsi supaya perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan selaras dan bersinergi;
2. Dokumen Renja ini kemudian menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025;
3. Dokumen Renja ini digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat tahunan.

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan OPD :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis
4. Melakukan reuiu kegiatan untuk melihat progres pelaksanaan kegiatan, baik dari segi penjadwalan, factor pendukung maupun faktor penghambat.

Selain sebagai pedoman atau acuan kinerja, renja 2025 ini juga digunakan sebagai tolok ukur dalam pertanggungjawaban kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang diimplementasikan melalui akuntabilitas penyelenggaraan tugas, yang mengandung acuan, bahwa hasil dari setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.